

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis dinamika kebijakan luar negeri Indonesia terhadap pengungsi Rohingya dengan menggunakan pendekatan teori Poliheuristik. Penelitian ini berfokus pada dua periode penting, yaitu tahun 2015 dan 2023, untuk memahami respons pemerintah Indonesia dalam konteks sosial, politik, kemanusiaan, dan ekonomi yang berbeda.

Hasil analisis menunjukkan bahwa:

Pada tahun 2015, Indonesia memilih untuk menerima pengungsi Rohingya karena adanya faktor kemanusiaan dan tekanan dari masyarakat Aceh, perhatian terhadap citra internasional, serta tidak adanya hambatan politik yang signifikan. Kebijakan ini dipilih setelah alternatif penolakan dieliminasi dalam tahap heuristik, dan kemudian dievaluasi secara rasional sebagai tindakan terbaik untuk menjaga posisi diplomatik Indonesia.

Keputusan menerima pengungsi Rohingya pada 2015 tidak diambil murni berdasarkan perhitungan ekonomi, tetapi melalui proses dua tahap yang kompleks. Tahap heuristik mengeliminasi opsi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar Indonesia, terutama nilai kemanusiaan, solidaritas lokal, dan citra internasional. Tahap rasional kemudian menguatkan pilihan dengan analisis multi-dimensi, di mana keuntungan politik dan moral dinilai lebih penting daripada kerugian ekonomi.

Keputusan pemerintah Indonesia pada tahun 2023 untuk tetap menampung pengungsi Rohingya secara sementara didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan yang kuat sekaligus motif politik strategis. Meskipun terdapat penolakan dari sebagian masyarakat, yang dipicu oleh isu maraknya sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta ketidakjelasan status pengungsi sebagai bagian

Mitha Angelica Samosir, 2025

**KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENANGANI ISU PENGUNGSI ROHINGYA DI
PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM; SEBUAH TINJAUAN POLIHEURISTIC THEORY**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

dari fenomena *secondary movement*, pemerintah tetap mempertahankan sikap untuk tidak menolak kedatangan pengungsi. Dalam kerangka kebijakan luar negeri yang berbasis nilai, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa permasalahan-permasalahan tersebut dapat ditangani melalui mekanisme kerja sama relokasi bersama UNHCR dan organisasi internasional lainnya, tanpa perlu mengambil langkah represif seperti pengusiran. Pendekatan ini mencerminkan konsistensi Indonesia dalam menjunjung tinggi prinsip non-refoulement dan komitmen terhadap norma-norma kemanusiaan internasional, meskipun tidak secara formal meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Dengan demikian, keputusan untuk menampung sementara tetap menjadi kebijakan resmi yang menyeimbangkan antara kepentingan nasional, stabilitas domestik, dan tanggung jawab moral di tengah krisis kemanusiaan.

Dengan demikian, meskipun mendapat penolakan dari masyarakat Aceh, Pemerintah yang tetap konsisten mempertahankan kebijakan untuk menerima pengungsi didasarkan pada faktor-faktor di bawah ini

Indonesia menerima pengungsi Rohingya dengan pertimbangan yang didasari oleh faktor kemanusiaan dan politik. Dari sisi kemanusiaan, kebijakan ini mencerminkan niat Indonesia untuk menunjukkan solidaritas terhadap penderitaan pengungsi Rohingya, terutama karena adanya kedekatan identitas sebagai sesama masyarakat Muslim. Selain itu, penyediaan fasilitas seperti tempat penampungan sementara bagi para pengungsi juga menjadi bentuk penghormatan terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Indonesia.

Sementara melalui perspektif politik, penerimaan pengungsi Rohingya memiliki tujuan untuk menjaga citra positif Indonesia di dunia internasional sebagai penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi diplomasi luar negeri guna mempertahankan hubungan baik dengan negara-negara ASEAN serta organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Langkah ini juga menunjukkan upaya pemerintah dalam

menyeimbangkan tekanan dari komunitas internasional dengan dinamika politik dan sosial yang berkembang di dalam negeri.

Penggunaan teori Poliheuristik berhasil mengungkap bahwa keputusan Indonesia bukan hanya didasarkan pada logika untung-rugi, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai dan persepsi politik domestik. Teori ini efektif dalam menjelaskan kompleksitas dan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dalam isu pengungsi.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa teori Poliheuristic cukup relevan dalam menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia. Namun demikian, pengembangan lanjutan sangat diperlukan agar teori ini dapat lebih aplikatif dalam konteks negara berkembang yang memiliki tantangan struktural dan tekanan domestik yang kompleks. Teori ini juga dapat digunakan lebih luas dalam isu kemanusiaan, sehingga peneliti selanjutnya disarankan untuk menerapkannya pada studi-studi serupa agar memperkaya esensi ilmu hubungan internasional.

6.2.2 Saran Praktis

Secara praktis, pemerintah Indonesia perlu memperkuat regulasi nasional terkait pengungsi, termasuk peninjauan kembali Perpres No. 125 Tahun 2016 agar lebih adaptif terhadap kondisi lapangan. Koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga internasional seperti UNHCR juga harus ditingkatkan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan. Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat lokal mengenai isu pengungsi perlu digencarkan guna memperkuat solidaritas kemanusiaan dan menghindari konflik sosial. Pemerintah juga disarankan untuk menyiapkan fasilitas penampungan yang lebih memadai dan mendorong kerja sama regional melalui forum ASEAN untuk menekan Myanmar menyelesaikan akar permasalahan pengungsi Rohingya.

Mitha Angelica Samosir, 2025

**KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENANGANI ISU PENGUNGS ROHINGYA DI
PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM; SEBUAH TINJAUAN POLIHEURISTIC THEORY**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]